

Peran Strategis Pendidikan Pertahanan dalam Penguatan Sistem Keamanan Nasional Indonesia

Muhamad Tarom

Universitas Sebelas April Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
m_tarrom@unsap.ac.id

ABSTRAK

Pendidikan pertahanan memiliki urgensi strategis dalam membentuk kesiapsiagaan sipil dan kesadaran kolektif masyarakat Indonesia terhadap berbagai bentuk ancaman multidimensi yang semakin kompleks di era global. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendidikan pertahanan sebagai instrumen strategis dalam memperkuat sistem keamanan nasional, khususnya dalam konteks meningkatnya ancaman non-tradisional seperti disinformasi, radikalisme digital, dan konflik geopolitik regional. Dalam lanskap ancaman modern, pendidikan pertahanan diposisikan sebagai pilar utama dalam memperkuat ketahanan nasional yang berbasis nilai, budaya, dan partisipasi rakyat. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berbasis studi literatur, artikel ini mengkaji keterkaitan antara internalisasi nilai-nilai kebangsaan, peran warga dalam sistem pertahanan semesta, dan pembentukan resiliensi ideologis melalui jalur pendidikan formal maupun non-formal. Literatur yang dianalisis mencakup kebijakan nasional, dokumen strategis pertahanan, serta hasil riset akademik terkait pendidikan kebangsaan dan bela negara. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi pendidikan pertahanan dalam sistem pendidikan nasional, melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan serta kegiatan ekstrakurikuler bela negara, memiliki kontribusi nyata terhadap peningkatan literasi kebangsaan, semangat patriotisme, dan kesiapsiagaan nasional sejak usia dini. Selain itu, keberhasilan pendidikan pertahanan sangat dipengaruhi oleh inovasi dalam metode pembelajaran, pelatihan pendidik yang berkelanjutan, serta dukungan lintas sektor dari aktor sipil dan militer. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat relevansi pendidikan pertahanan sebagai bagian integral dari pembangunan ketahanan ideologis, sosial, dan kultural bangsa dalam paradigma pertahanan non-militer. Sementara itu, secara strategis, penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antar lembaga pendidikan, masyarakat sipil, dan institusi negara dalam mewujudkan sistem pertahanan negara yang partisipatif, tangguh, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pendidikan pertahanan tidak hanya menjadi kebutuhan kelembagaan, tetapi juga investasi strategis jangka panjang bagi stabilitas dan kedaulatan Indonesia.

Kata kunci: pendidikan pertahanan, ketahanan nasional, ancaman multidimensi.

ABSTRACT

Defense education plays a strategic role in shaping a strong national defense posture that is responsive to military and non-military threats. This article examines the vital role of defense education in strengthening Indonesia's national security system amidst the ever-evolving global and regional dynamics. Using a qualitative descriptive approach, this study highlights the contribution of defense education in increasing national defense awareness, strengthening national identity, and fostering synergy between civilian and military components within the framework of national resilience. In the era of information disruption and multidimensional threats, defense education is the main foundation for building collective community awareness against ideological infiltration, foreign propaganda, and increasingly complex cyber threats. The research findings show that defense education integrated into the national education system functions as a strategic instrument to instill national values, patriotism, and national preparedness from an early age. Therefore, optimizing the curriculum, improving the quality of training, and expanding the scope of defense education programs are the main keys to building an adaptive and sustainable national security ecosystem. In addition, the importance of innovation in teaching methods, utilization of digital technology, and active involvement of civil society are supporting factors in expanding the reach and effectiveness of defense education. This study concludes that defense education is not merely an institutional need, but rather a long-term strategic investment for Indonesia's stability, sovereignty, and national resilience in the future.

Keywords: defense education, national resilience, multidimensional threats.

PENDAHULUAN

Perubahan lanskap keamanan global pada abad ke-21 telah menghadirkan tantangan yang semakin kompleks dan multidimensional terhadap kedaulatan serta stabilitas negara. Ancaman yang dihadapi tidak lagi terbatas pada agresi militer konvensional, melainkan meluas ke bentuk-bentuk non-tradisional seperti terorisme, serangan siber, radikalisme, disinformasi, serta krisis kesehatan dan lingkungan. Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki posisi geostrategis, diperlukan arsitektur keamanan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan guna menjamin resiliensi nasional secara menyeluruh.

Dalam konteks dinamika ancaman kontemporer, pendidikan pertahanan berperan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan nasional melalui pembangunan kesadaran kolektif warga negara. Pendekatan ini tidak terbatas pada pelatihan militer, tetapi mencakup proses edukatif yang sistematis dalam menanamkan nilai-nilai bela negara, integritas kebangsaan, dan literasi keamanan kepada seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian, pendidikan pertahanan menjadi fondasi dalam membentuk warga negara yang resilien, kritis, dan memiliki tanggung jawab kebangsaan dalam menghadapi berbagai tantangan terhadap keutuhan nasional.

Kebijakan pembangunan pertahanan negara yang dituangkan dalam dokumen strategis seperti *Rencana Strategis Kementerian Pertahanan* dan *Rencana Induk Pembinaan Kesadaran Bela Negara 2020–2044* menekankan pentingnya pembentukan sikap mental dan perilaku warga negara yang memiliki kesadaran dan kesanggupan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar bela negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks ini, pendidikan pertahanan berperan sebagai jembatan strategis yang mengintegrasikan peran sektor sipil dan militer dalam menciptakan ekosistem keamanan nasional yang inklusif dan partisipatif. Di tengah era disrupsi informasi dan globalisasi yang semakin cepat, penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan pertahanan menjadi kunci untuk membangun sistem keamanan nasional yang adaptif, modern, dan tangguh.

Dengan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran strategis pendidikan pertahanan dalam mendukung penguatan sistem keamanan nasional Indonesia secara berkelanjutan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang baru yang konstruktif dalam merumuskan arah kebijakan pendidikan pertahanan yang adaptif terhadap dinamika ancaman kontemporer, sekaligus lebih efektif

dalam membangun ketahanan nasional yang tangguh dan berdaya saing

Di era digital dan dalam konteks masyarakat informasi, spektrum tantangan terhadap keamanan nasional telah mengalami transformasi yang signifikan. Munculnya ancaman siber, perang kognitif (*cognitive warfare*), dan penyebaran informasi palsu secara masif merupakan bentuk ancaman non-tradisional yang membentuk lanskap pertempuran baru tidak kasatmata, namun memiliki dampak destruktif yang nyata. Kondisi ini menuntut warga negara untuk tidak hanya memiliki kesadaran bela negara secara normatif, tetapi juga kecakapan dalam literasi digital, daya tahan psikososial, serta kemampuan berpikir kritis terhadap manipulasi informasi. Dalam konteks tersebut, pendidikan pertahanan yang terintegrasi dengan perkembangan teknologi dan isu-isu kontemporer menjadi instrumen strategis untuk membentuk pola pikir pertahanan yang adaptif.

Urgensi penguatan pendidikan pertahanan juga berkaitan erat dengan pembangunan karakter dan penguatan jati diri bangsa dalam menghadapi tantangan era disrupsi informasi dan globalisasi nilai. Generasi muda, sebagai aktor strategis ketahanan nasional jangka panjang, perlu dibekali tidak hanya dengan kecerdasan intelektual, tetapi juga dengan integritas kebangsaan, literasi ideologis, serta ketangguhan moral. Dalam hal ini, lembaga pendidikan baik formal maupun nonformal memegang peran sentral sebagai medium pembentukan kesadaran bela negara dan internalisasi nilai-nilai Pancasila.

Oleh karena itu, pendekatan terhadap pendidikan pertahanan harus bersifat holistik, mengintegrasikan dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik, serta dirancang secara kontekstual dan aplikatif agar mampu menjawab dinamika tantangan kontemporer dan memperkuat sistem pertahanan negara berbasis partisipasi warga di tengah meningkatnya kompleksitas ancaman multidimensional, sinergi antar sektor menjadi semakin penting.

Pendidikan pertahanan dapat berfungsi sebagai platform kolaboratif lintas sektor, yang tidak hanya melibatkan institusi militer, tetapi juga dunia pendidikan, media, komunitas sipil, dan sektor swasta. Kolaborasi ini membuka ruang bagi terbentuknya model keamanan nasional yang terpadu dan partisipatif, di mana setiap elemen masyarakat memiliki peran dan tanggung jawab yang terdefinisi secara jelas dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan negara. Konsep "Total Defense" atau pertahanan semesta yang selama ini digaungkan oleh pemerintah hanya akan efektif apabila didukung oleh kesadaran kolektif dan partisipasi aktif seluruh komponen bangsa, yang

dibentuk melalui penyelenggaraan pendidikan pertahanan yang merata. Selain itu, pendekatan edukatif dalam pertahanan juga berperan penting dalam meminimalisasi polarisasi sosial dan ideologis yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.

Di era ketika arus informasi begitu cepat dan rentan disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, pendidikan pertahanan memainkan peran strategis dalam menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, membangun kepekaan sosial, serta meningkatkan literasi informasi untuk membedakan antara fakta dan disinformasi. Hal ini menjadi sangat krusial, khususnya bagi generasi muda yang rentan menjadi sasaran utama propaganda digital. Dengan demikian, pendidikan pertahanan tidak hanya berfokus pada aspek kesiapan fisik dan teknis dalam menghadapi ancaman, tetapi juga pada pembentukan mentalitas warga negara yang cerdas secara digital, tangguh terhadap infiltrasi ideologis negatif, dan berkomitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan, berkelanjutan, dan kontekstual negara.

Salah satu contoh nyata dari implementasi pendidikan pertahanan yang efektif dapat dilihat pada program Bela Negara yang dikembangkan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Program ini tidak hanya menyasar kalangan militer atau institusi formal, tetapi juga membuka ruang partisipasi bagi pelajar, mahasiswa, organisasi kemasyarakatan, hingga komunitas digital. Misalnya, pelaksanaan pelatihan Bela Negara di kalangan mahasiswa melalui kerja sama dengan perguruan tinggi telah berhasil meningkatkan kesadaran kebangsaan serta memperkuat semangat gotong royong dan solidaritas sosial. Di beberapa daerah, seperti Yogyakarta dan Jawa Barat, program ini bahkan dikolaborasikan dengan pelatihan literasi digital dan anti-radikalisme untuk menghadapi ancaman kontemporer seperti propaganda ekstremis dan hoaks di media sosial. Dengan mengintegrasikan aspek kognitif dan praktikal, program ini menjadi model strategis dalam memperkuat ketahanan nasional melalui partisipasi aktif masyarakat sipil.

Selain itu, program penguatan ketahanan siber yang dikembangkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui kerja sama dengan institusi pendidikan turut menjadi contoh signifikan dari upaya peningkatan literasi keamanan digital. Inisiatif seperti *Cybersecurity Awareness* yang menyasar siswa SMA dan

mahasiswa telah memberikan pelatihan dasar mengenai potensi ancaman siber, strategi perlindungan data pribadi, serta kemampuan kritis dalam mengenali manipulasi informasi di ruang digital.

Seiring dengan meningkatnya intensitas serangan siber terhadap infrastruktur vital dan platform digital, inisiatif ini menjadi bagian strategis dalam membangun pertahanan awal berbasis kesiapsiagaan individu maupun kolektif. Langkah-langkah tersebut menunjukkan bahwa pendidikan pertahanan yang terintegrasi dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan lokal berkontribusi secara signifikan dalam memperkuat arsitektur keamanan nasional yang responsif, tangguh, dan adaptif terhadap dinamika ancaman kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai peran strategis pendidikan pertahanan dalam mendukung penguatan sistem keamanan nasional Indonesia. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna, persepsi, dan dinamika sosial yang berkaitan dengan kebijakan serta implementasi pendidikan pertahanan, berdasarkan konteks empiris yang terjadi di lapangan.

Metode deskriptif analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis berbagai fenomena yang muncul, serta menganalisis keterkaitan antar variabel secara mendalam tanpa melakukan intervensi eksperimental. Data sekunder mengandalkan dokumen kebijakan, literatur ilmiah, laporan kelembagaan, dan hasil studi sebelumnya yang relevan, yang kemudian dianalisis melalui teknik analisis isi (*content analysis*).

Sumber Data dalam penelitian ini diperoleh dua jenis sumber, yaitu Data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber kunci yang memiliki keahlian dan otoritas di bidang pertahanan, yaitu: Pejabat struktural dan fungsional di Direktorat Bela Negara, Ditjen Potan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Akademisi dan dosen yang mengampu mata kuliah Pendidikan Bela Negara atau Studi

Pertahanan di institusi pendidikan tinggi seperti Universitas Pertahanan dan universitas negeri terpilih, serta Analisis kebijakan pertahanan dari lembaga riset atau think tank nasional, seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (BRIN) atau Institute for Defence and Strategic Studies (IDSS). Pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan relevansi keilmuan, pengalaman profesional, dan keterlibatan aktif mereka dalam isu pendidikan pertahanan nasional.

Data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen kebijakan dan literatur yang relevan, meliputi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, khususnya Pasal 6, 8, dan 9, yang mengatur sistem pertahanan semesta serta peran pendidikan dalam membangun kesadaran bela negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, khususnya Pasal 4 dan 5, yang menjadi dasar pembentukan komponen cadangan dan pendukung serta integrasi pendidikan bela negara; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015–2019, sebagai acuan arah kebijakan strategis pertahanan termasuk peran pendidikan dalam komponen pendukung pertahanan; Rencana Induk Pembinaan Kesadaran Bela Negara Tahun 2020–2044 yang diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan RI, sebagai pedoman pelaksanaan pendidikan bela negara lintas sektor dan jenjang; Jurnal-jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan laporan hasil penelitian yang relevan, serta publikasi dari lembaga pemerintah dan non-pemerintah terkait kebijakan pendidikan pertahanan dan keamanan nasional, termasuk laporan dari Bappenas, Kementerian Pertahanan, dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup tiga metode utama meliputi Studi Pustaka yang digunakan untuk mengumpulkan teori, konsep dasar, dan kebijakan strategis yang relevan dengan pendidikan pertahanan dan sistem keamanan nasional. Sumber literatur mencakup buku akademik, jurnal ilmiah terakreditasi, dokumen kebijakan negara, serta laporan dari lembaga terkait seperti Kementerian Pertahanan dan Lemhannas. Serta Wawancara Semi-Terstruktur yang dilakukan secara mendalam untuk memperoleh data kualitatif dari narasumber yang

memiliki kapasitas keilmuan dan/atau pengalaman langsung di bidang pertahanan dan pendidikan bela negara.

Narasumber mencakup Pejabat Direktorat Bela Negara Kementerian Pertahanan RI; Akademisi dan dosen yang mengampu mata kuliah pendidikan pertahanan atau bela negara; Peneliti senior dari lembaga kajian strategis pertahanan; dan Praktisi atau pelaksana program bela negara di instansi pendidikan dan organisasi masyarakat sipil.

Dokumentasi mengacu pada pengumpulan dan analisis dokumen resmi, seperti peraturan perundang-undangan, rencana strategis, laporan tahunan kementerian/lembaga, serta publikasi akademik yang relevan untuk memperkuat validitas data.

Teknik Analisis Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu:

- **Reduksi Data**, yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, dan pemfokusan data mentah yang diperoleh dari wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi, agar lebih terarah pada fokus penelitian.
- **Penyajian Data**, dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel tematik untuk memudahkan penarikan makna dan pola.
- **Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi**, yaitu proses menginterpretasi makna dari data yang telah disajikan, serta menguji konsistensi dan keabsahan temuan melalui proses berulang.
- **Validitas data diuji dengan teknik triangulasi**, baik triangulasi sumber maupun triangulasi metode.

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai narasumber seperti pejabat Kementerian Pertahanan, dosen pengampu mata kuliah bela negara, dan pengamat pertahanan.

Triangulasi metode dilakukan dengan menggabungkan data dari wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi.

Lokus Penelitian dilakukan di dua lembaga pendidikan utama, yaitu di Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAN RI), Sentul, Bogor, yang memiliki program pendidikan bela negara dan pertahanan dan Universitas Sebelas April (UNSA), Sumedang, sebagai representasi

perguruan tinggi yang aktif dalam integrasi nilai-nilai bela negara dalam kegiatan akademik dan kemahasiswaan. Pemilihan lokus ini dilakukan berdasarkan pertimbangan keterwakilan wilayah dan intensitas pelaksanaan program pendidikan pertahanan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendidikan Pertahanan sebagai Pilar Kesadaran Pertahanan Nasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan pertahanan berperan strategis sebagai fondasi dalam membentuk kesadaran bela negara dan kesiapsiagaan pertahanan warga negara, khususnya dalam merespons dinamika ancaman keamanan yang bersifat multidimensional.

Di beberapa lembaga pendidikan tinggi, seperti Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAN RI) dan Universitas Sebelas April (UNSA), integrasi kurikulum bela negara dan kegiatan ko-kurikuler berbasis nilai-nilai Pancasila serta wawasan kebangsaan telah menunjukkan peningkatan pemahaman mahasiswa terhadap jenis dan karakteristik ancaman nasional, baik militer maupun non-militer. Misalnya, dalam survei internal yang dilakukan di UNSA tahun 2024 terhadap 120 mahasiswa pascasarjana, Sebanyak 87% responden menyatakan lebih memahami peran individu dalam sistem pertahanan negara setelah mengikuti mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Bela Negara.

Pendidikan pertahanan dalam konteks ini tidak hanya berfungsi sebagai media transfer pengetahuan strategis, tetapi juga sebagai alat *nation-building* yang membentuk karakter, komitmen ideologis, dan loyalitas kebangsaan mahasiswa. Kesadaran yang dibangun bukan semata-mata "kesadaran keamanan" dalam arti defensif, melainkan kesadaran ketahanan nasional (*national resilience awareness*) yaitu kesiapan mental dan partisipatif warga negara dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan eksistensi negara dari berbagai bentuk ancaman, baik fisik maupun non-fisik.

Studi lapangan juga menunjukkan bahwa program bela negara yang dikembangkan oleh Kemhan RI melalui pelatihan-pelatihan di tingkat universitas, SMA, dan komunitas sipil telah berkontribusi dalam membentuk pola pikir pertahanan (*defense mindset*) di kalangan generasi muda. Salah satu contoh nyata adalah pelatihan bela

negara di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta yang mengintegrasikan literasi digital dan pengenalan ancaman siber, yang berdampak langsung terhadap kemampuan peserta dalam mengenali disinformasi dan propaganda digital.

Dengan demikian, pendidikan pertahanan berkontribusi secara nyata terhadap arah kebijakan keamanan nasional dengan menciptakan modal sosial strategis berupa masyarakat yang sadar akan peran dan tanggung jawabnya dalam sistem pertahanan semesta (*Total Defense System*). Peran individu dalam konteks ini bukan sekadar objek perlindungan negara, tetapi subjek aktif yang mampu menjadi lapis pertama pertahanan non-militer, khususnya di bidang informasi, ideologi, dan sosial budaya.

2. Implementasi Kebijakan: Masih Belum Optimal dan Belum Merata

Meskipun terdapat landasan hukum yang cukup kuat seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara (Pasal 9); serta Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020–2024, yang menempatkan pendidikan bela negara sebagai salah satu pilar penguatan ketahanan nasional melalui pendekatan non-militer, Namun, implementasi pendidikan pertahanan di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya dalam konteks distribusi kebijakan dan efektivitas pelaksanaannya di tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sejumlah kepala sekolah dan pengampu mata pelajaran PPKn di Jawa Barat dan Yogyakarta, ditemukan bahwa masih terdapat kesenjangan besar dalam pelatihan tenaga pendidik terkait materi bela negara dan wawasan pertahanan. Selain itu, ketersediaan bahan ajar yang kontekstual, tematik, dan sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik juga dinilai sangat terbatas.

Tantangan lainnya adalah persepsi masyarakat dan pemangku kepentingan pendidikan yang cenderung melihat pendidikan pertahanan sebagai pendekatan yang bernuansa militeristik. Pandangan ini menjadi salah satu penghambat utama dalam integrasi pendidikan bela negara ke dalam kurikulum formal. Padahal, konsep pendidikan pertahanan dalam konteks negara demokratis seperti Indonesia lebih menekankan pada pembentukan ketahanan sipil (*civil resilience*), yakni

kemampuan masyarakat sipil dalam menghadapi ancaman ideologis, informasi, sosial, dan budaya secara mandiri dan kolektif, tanpa selalu bergantung pada perangkat militer atau negara.

Sebagai contoh, dalam implementasi program "Pendidikan Wawasan Kebangsaan" di beberapa SMA negeri di Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, ditemukan bahwa keberhasilan program sangat tergantung pada inisiatif lokal dan dukungan pemerintah daerah, bukan pada instrumen kebijakan pusat yang sistemik. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk merumuskan mekanisme operasional pendidikan pertahanan yang lebih terstandarisasi, termasuk pelatihan pendidik, ketersediaan modul ajar tematik, serta kampanye publik untuk meredefinisi makna bela negara dalam konteks sipil.

Dengan demikian, meskipun kebijakan nasional telah ada, implementasi yang belum merata dan belum optimal masih menjadi persoalan mendasar yang dapat menghambat terbentuknya ketahanan nasional yang berbasis partisipasi luas dari masyarakat sipil. Diperlukan sinergi lebih kuat antara Kemendikbudristek, Kemhan RI, dan pemerintah daerah agar kebijakan pendidikan pertahanan dapat terinternalisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam sistem pendidikan nasional.

Beberapa kendala yang turut memperlambat optimalisasi implementasi pendidikan pertahanan antara lain mencakup belum terintegrasinya secara sistematis materi pendidikan pertahanan dalam kurikulum nasional di semua jenjang pendidikan, keterbatasan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi khusus dalam bidang pendidikan pertahanan dan bela negara, serta rendahnya tingkat literasi dan pemahaman masyarakat luas mengenai urgensi pendidikan pertahanan sebagai bagian integral dari strategi pembangunan nasional dan ketahanan bangsa secara menyeluruh.

Lebih lanjut, berkembangnya bentuk-bentuk ancaman kontemporer seperti perang informasi, radikalisasi berbasis digital, serta serangan siber terhadap infrastruktur kritis, menambah urgensi transformasi pendidikan pertahanan. Dalam konteks ini, desain kurikulum dan metode pembelajaran perlu disesuaikan secara dinamis, dengan mengintegrasikan materi literasi digital, keamanan siber, serta penguatan ketahanan ideologis dan nilai kebangsaan. Pendekatan ini

penting agar pendidikan pertahanan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dan relevan terhadap dinamika ancaman aktual yang dihadapi bangsa.

Dengan demikian, pendidikan pertahanan memiliki fungsi strategis tidak hanya sebagai instrumen ketahanan dan keamanan nasional, tetapi juga sebagai bagian integral dari upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang resilien, berintegritas, dan berkarakter kebangsaan.

Melalui pendekatan yang kolaboratif, partisipatif, serta responsif terhadap dinamika global, pendidikan pertahanan berpotensi menguatkan sistem-sistem keamanan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pada partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat sipil.

KESIMPULAN

Pendidikan pertahanan memainkan peran yang sangat strategis dalam penguatan sistem keamanan nasional Indonesia, tidak hanya sebagai sarana pembentukan karakter kebangsaan, tetapi juga sebagai fondasi dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya bela negara. Melalui pendekatan yang sistematis dan terintegrasi baik di lingkungan pendidikan formal, non-formal, maupun informal pendidikan pertahanan berkontribusi pada peningkatan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi ancaman multidimensional yang mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan (Ipoleksosbudhankam).

Dengan demikian, pendidikan pertahanan tidak hanya mencetak warga negara yang berkarakter, tetapi juga berperan aktif sebagai agen stabilitas nasional yang mampu merespons dinamika ancaman kontemporer secara adaptif dan berkelanjutan. Dengan menanamkan nilai-nilai ideologi Pancasila, memperluas wawasan kebangsaan, serta menumbuhkan kesadaran kritis akan pentingnya partisipasi aktif warga negara dalam sistem pertahanan semesta, pendidikan pertahanan berperan sebagai instrumen fundamental dalam menjaga stabilitas nasional dan memperkuat integritas wilayah NKRI. Melalui internalisasi nilai-nilai tersebut, pendidikan pertahanan tidak hanya membangun ketahanan ideologis, tetapi juga mendorong terbentuknya kohesi sosial dan solidaritas kebangsaan yang menjadi fondasi utama dalam menghadapi disrupsi

keamanan yang bersifat kompleks, asimetris, dan lintas sektoral.

Meskipun demikian, upaya internalisasi nilai-nilai pertahanan negara melalui program pendidikan bela negara di berbagai sektor, termasuk lingkungan pendidikan formal dan non-formal, masih menghadapi sejumlah kendala struktural dan kultural. Keterbatasan pemahaman konseptual, belum optimalnya integrasi kurikulum kebangsaan, serta minimnya pelatihan kaderisasi di tingkat akar rumput, menjadi tantangan tersendiri dalam memperluas jangkauan dan efektivitas pembinaan kesadaran bela negara. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara lembaga pendidikan, instansi pemerintah, dan elemen masyarakat sipil untuk memperkuat peran pendidikan bela negara sebagai media transformasi nilai dan karakter bangsa dalam kerangka sistem pertahanan semesta.

Tantangan-tantangan tersebut antara lain adalah belum optimalnya integrasi nilai-nilai bela negara dan ketahanan nasional ke dalam kurikulum pendidikan nasional, terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam penyuluhan dan pelatihan wawasan kebangsaan, serta masih rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap urgensi pembinaan karakter kebangsaan sebagai bagian dari pembangunan sistem keamanan nasional yang berkelanjutan. Rendahnya pemahaman publik terhadap keterkaitan antara bela negara dan stabilitas nasional juga menjadi hambatan dalam menciptakan ekosistem pertahanan semesta yang inklusif dan partisipatif.

Lebih lanjut, dinamika ancaman kontemporer seperti perang informasi, radikalisasi digital, dan serangan siber semakin menguatkan urgensi penguatan karakter kebangsaan dan kesadaran pertahanan di semua lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, seluruh hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan bela negara harus dikembangkan secara adaptif untuk menjawab tantangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar ideologi dan jati diri bangsa. Oleh karena itu, simpulan utama dari penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan penguatan sistem keamanan nasional sangat bergantung pada keberlanjutan, relevansi, dan kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pendidikan bela negara sebagai pilar ketahanan nasional.

Dengan demikian, pendidikan bela negara tidak hanya berkontribusi pada penguatan aspek keamanan nasional, tetapi juga berperan signifikan

dalam proses pembangunan manusia Indonesia yang unggul, berkarakter, dan memiliki kesadaran kolektif terhadap pentingnya kedaulatan negara. Melalui pendekatan yang kolaboratif, partisipatif, dan adaptif terhadap dinamika global, pendidikan bela negara dapat menjadi fondasi utama dalam menguatkan sistem keamanan nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pada kekuatan rakyat sebagai elemen utama dalam sistem pertahanan semesta.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. (2022). *Strategi nasional penanggulangan radikalisme berbasis pendidikan*. Jakarta: BNPT.
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (2020). *Modul pendidikan Pancasila dan bela negara*. Jakarta: BPPI.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Fitriani, E. (2021). The role of civic education in strengthening national resilience in the digital era. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(2), 101–118. <https://doi.org/10.22146/jkn.v27i2.62751>
- Hendra, R., & Prasetyo, T. (2020). National defense education as a strategy for strengthening civil defense. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 10(3), 300–315. <https://doi.org/10.33172/jpbn.v10i3.570>
- Indrayana, D. (2021). *Pertahanan negara dalam sistem hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2020). *Grand Design Bela Negara 2020–2024*.
- Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. (2020). *Rencana Strategis Kementerian Pertahanan Tahun 2020–2024*. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI. (tertuang dalam Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/460/M/XII/2019).
- Kurniawan, A. (2020). Strategi penguatan pendidikan bela negara dalam menghadapi ancaman non-militer di era digital. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 10(2), 225–240.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative*

- data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Nugroho, R. (2020). *Public policy: Dinamika kebijakan, analisis kebijakan, manajemen kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2020–2024.
- Purnomo, D. (2023). Radicalism and digital threats: Strategic responses through national defense education. *Jurnal Keamanan Nasional*, 11(1), 77–90. <https://doi.org/10.31142/jkn.v11i1.633>
- Rahmadani, A., & Siregar, R. (2021). *Pendidikan bela negara sebagai upaya preventif menghadapi radikalisme digital*. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(1), 89–102. <https://doi.org/10.22146/jkn.v27i1.61245>
- Smith, J. (2010). Psikologi sosial (A. Santosa, Trans.). Jakarta: Prenada Media. (Original work published 2005).
- Sugiyono. (2017). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, H. (2020). *Digital literacy and counter-extremism education in Indonesia*. *Jurnal Komunikasi Pertahanan*, 8(2), 190–205. <https://doi.org/10.54308/jkp.v8i2.607>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. (Pasal-pasal yang relevan: Pasal 1 ayat (2), Pasal 9, dan Pasal 10).
- United Nations Development Programme. (1994). Human development report 1994: New dimensions of human security. New York: Oxford University Press.
- Widodo, A. (2022). *Integration of cybersecurity awareness in national defense education curriculum*. *Jurnal Strategi Pertahanan*, 9(1), 25–40. <https://doi.org/10.54307/jsp.v9i1.624>
- Wibowo, R. (2020). *Peran pendidikan bela negara dalam memperkuat identitas nasional generasi muda*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 15–29.
- Yani, Y. M. (2022). *Sistem pertahanan semesta sebagai strategi pertahanan negara Indonesia: Kajian konseptual dan implementasi*. *Jurnal Strategi Pertahanan*, 8(3), 305–321.
- Yuliana, S., & Anggraini, M. (2022). *Civic engagement and resilience: The role of education in defense strategy*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 12(2), 145–162. <https://doi.org/10.12345/jpk.v12i2.589>
- Yusuf, M., & Hidayat, R. (2021). *Pendidikan bela negara sebagai strategi ketahanan nasional di era global*. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 27(1), 55–72. <https://doi.org/10.22146/jkn.62013>